

POTENSI, TANTANGAN, DAN REKOMENDASI STRATEGI PENGELOLAAN INDUSTRI KELAPA DI KABUPATEN INDRAGIRI HILIR

Rezky Kinanda¹, Jusatria¹, Roberta Zulfhi Surya¹, Amal Rizky Harahap¹, Ilyas¹.

¹Universitas Islam Indragiri

Email: kinandarezky@gmail.com (korespondensi)

Abstract

The coconut industry in Indragiri Hilir is a regional characteristic. In addition, the coconut industry is also one of the main livelihoods for the people of Indragiri Hilir. This industry has various potentials in Indragiri Hilir. The Inhil Government must identify and understand its potential so that it can be maximized. In an effort to maximize the existing potential, the Government must understand the challenges or obstacles so that it is easier to solve the problems that occur. Understanding the potential and challenges will facilitate the Government in efforts to improve the quality of the management of the coconut industry. In addition, the Government must also be able to develop strategies that can be implemented or implemented in order to carry out good governance. Both in terms of policies, analysis, and direct actions such as counseling or training to farmers. This journal will present the potential, challenges, and strategic recommendations to advance the coconut industry in Inhil. Identify several potentials that must be maximized as well as challenges or obstacles that must be considered in the future. And it has been described in this journal the strategic recommendations that can be applied by the Indragiri Hilir Government.

Keywords: Coconut Industry, Potential, Challenges, Strategy

Abstrak

Industri kelapa di Kabupaten Indragiri Hilir merupakan sebuah ciri khas daerah. Selain itu industri kelapa juga menjadi salah satu mata pencaharian utama masyarakat Kabupaten Indragiri Hilir. Berbagai potensi dimiliki oleh industri ini di Kabupaten Inhil. Pemerintah Kabupaten Inhil harus mengidentifikasi dan memahami potensi yang dimiliki agar dapat dimaksimalkan. Dalam usaha memaksimalkan potensi yang ada, Pemerintah harus memahami tantangan atau kendala agar lebih mudah dalam menyelesaikan permasalahan yang terjadi. memahami potensi dan tantangan akan memudahkan Pemerintah dalam usaha meningkatkan kualitas pengelolaan industri kelapa. Selain itu Pemerintah juga harus dapat menyusun strategi-strategi yang dapat diterapkan atau diimplementasikan guna menjalankan tata kelola yang baik. Baik dari segi kebijakan, analisa, maupun tindakan langsung seperti penyuluhan atau pelatihan kepada para petani. Jurnal ini akan menyajikan potensi, tantangan, dan rekomendasi strategi guna memajukan industri kelapa di Kabupaten Inhil. Teridentifikasi beberapa potensi yang harus dimaksimalkan serta tantangan atau kendala yang harus diperhatikan di masa yang akan datang. Serta telah dijelaskan dalam jurnal ini rekomendasi-rekomendasi strategi yang dapat diterapkan oleh Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir.

Kata Kunci: Industri Kelapa, Potensi, Tantangan, Strategi

1. PENDAHULUAN

Industri Kelapa adalah salah satu sektor yang memberikan banyak pendapatan untuk Kabupaten Indragiri Hilir. Begitupun dari sisi sosial, industri kelapa sudah menjadi budaya atau kebiasaan pekerjaan masyarakat

Indragiri Hilir.

Luas Kebun kelapa di Kabupaten Indragiri Hilir adalah 423.934 Ha, 11% dari keseluruhan luas kebun kelapa di Indragiri Hilir berada di Kecamatan Enok yang luasnya 44.753 Ha. Luas ini tercatat sebagai

perkebunan kelapa terluas di Indonesia. Potensi ini harus mendapat perhatian besar oleh Pemerintah Kabupaten Inhil.

Pada umumnya para petani hanya memanfaatkan potensi dengan menjual kelapa dalam bentuk kelapa bulat dan kopra untuk selanjutnya di jual ke perusahaan di dalam daerah ataupun ke luar daerah. Serabut dan batok kelapa juga nya dijual apa adanya tanpa melewati proses indurti kreatif. Konsep industri yang lebih kreatif untuk menghasilkan produk kelapa yang lebih bernilai secara ekonomis perlu didorong lebih besar agar secara ekonomi penjualan kelapa dapat bernilai lebih besar dari yang ada saat ini.

Pada kondisi terkini Pemerintah Kabupaten Inhil harus memahami potensi dan tantangan serta alternative strategi pengolahan industry kelapa guna meningkatkan kuantitas dan kualitas industri kelapa di Kabupaten Inhil. Permasalahan Industri kelapa di Inhil di masa sekarang sudah memiliki karakteristik yang berbeda daripada permasalahan di masa lalu. Potensi yang besar diikuti pula dengan tantangan yang besar pula.

Penelitian ini akan membantu menjabarkan potensi, tantangan dan alternatif strategi guna menghasilkan industry kelapa yang maju dan berkelanjutan berdasarkan berbagai penelitian ilmiah yang telah dilakukan namun belum disinkronisasikan.

2. METODE PENELITIAN

Kajian ini menggunakan metode studi literatur yang bersumber dari hasil-hasil penelitian yang dipublikasikan yang dapat diakses secara online, antara lain:

- (1) Penelitian 1: Pengelolaan Potensi Kelapa Di Kabupaten Indragiri Hilir Oleh Hendri Setiawan dari Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Riau
- (2) Penelitian 2: Analisis Keberlanjutan Usahatani Perkebunan Kelapa Rakyat Di Kabupaten Indragiri Hilir oleh Yogy Rasihen dari Institut Pertanian Bogor
- (3) Penelitian 3: Dampak Pengembangan Perkebunan Kelapa Rakyat Terhadap Kemiskinan Dan Perekonomian Kabupaten Indragiri Hilir Ahmad Aris, Bambang Juanda, Akhmad Fauzi, Dan Dedi Budiman Hakim dari Institut Pertanian Bogor
- (4) Penelitian 4: Penentuan Lokasi Cluster Industri Kelapa Di Kabupaten Indragiri Hilir oleh Dita Suwirni Maswan dari Institut Teknologi Sepuluh Nopember Surabaya.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 POTENSI INDUSTRI KELAPA DI KABUPATEN INHIL

Potensi industri kelapa adalah hal yang harus diidentifikasi Pemerintah Kabupaten Inhil dengan benar sebelum menyusun kebijakan. Kebijakan yang mengakomodasi potensi dengan tepat akan mendatangkan hasil yang maksimal. Identifikasi potensi adalah kegiatan yang harus dilakukan secara ilmiah agar fakta yang dihasilkan dapat dipertanggungjawabkan dan tepat sasaran.

Secara teori potensi adalah suatu kemampuan, kesanggupan, kekuatan ataupun daya yang mempunyai kemungkinan untuk bisa dikembangkan lagi menjadi bentuk yang lebih besar (Majdi, 2007). Sedangkan dalam bukunya (Prihadhi, 2004) potensi bisa disebut sebagai kekuatan, energi atau kemampuan yang terpendam yang dimiliki dan belum dimanfaatkan secara optimal. Pengotimalan ini dilakukan atau dilaksanakan melalui pekerjaan, usaha, dan pembangunan.

Berdasarkan definisi di atas kita mengidentifikasi berbagai potensi industri kelapa di Kabupaten Inhil. Potensi-potensi disusun berlandaskan penelitian-penelitian ilmiah yang telah dinyatakan pada bagian metodologi.

1. Potensi Pada Indikator Luas Perkebunan

Berdasarkan Penelitian 2 dinyatakan bahwa Provinsi Riau Terdiri dari 12 Kabupaten dengan Total Luas Lahan Perkebunan 510.092 Hektar tahun 2017. Sedangkan Kabupaten Inhil meliki lias perkebunan mencapai 302.369,94 Ha.

Fakta di atas menunjukkan bahwa luas perkebunan Kabupaten Inhil adalah yang terbesar di Provinsi Riau, hal ini menunjukkan bahwa potensi luas perkebunan harus menjadi modal yang bisa dimanfaatkan oleh Pemerintah Kabupaten Inhil

2. Potensi Multiplier Effect Industri Kelapa

Berdasarkan Penelitian 3 menggunakan metode analisis multiplier effect diperoleh hasil yang mengindikasikan bahwa sektor Kelapa memiliki koefisien sebagai berikut:

- Koefisien pengganda ouput sebesar 4,92
- Koefisien pengganda nilai tambah sebesar 5,47
- Koefisien pengganda pendapatan sebesar 7,10
- Koefisin pengganda tenaga kerja sebesar 4,81.

Makna dari koefisien pengganda output

tersebut adalah setiap peningkatan permintaan akhir sektor kelapa sebesar satu satuan, maka output perekonomian Kabupaten Indragiri Hilir akan meningkat sebesar ekuivalen 4,93. Dengan kata lain, apabila setiap permintaan akhir (final demand) sektor Kelapa meningkat sebesar 1 milyar rupiah, maka dampaknya terhadap output perekonomian wilayah Kabupaten Indragiri Hilir adalah sebesar 4,93 milyar rupiah.

Sektor industri kelapa skala besar (swasta) memiliki dampak pengganda tenaga kerja yang lebih kecil yaitu 0,43 dibandingkan dengan sektor kelapa dan sektor industri kelapa skala rumah tangga dengan nilai koefisien pengganda tenaga kerja masing-masing 4,81 dan 1,71. Hal ini menunjukkan bahwa industri kelapa skala besar menyerap lapangan kerja yang lebih kecil karena padat modal dan teknologi, sementara sektor kelapa dan industri kelapa skala rumah tangga justru padat tenaga kerja.

Dari hasil penelitian 3 tersebut dapat disimpulkan bahwa industri kelapa berpotensi meningkatkan perekonomian Kabupaten Inhil serta peningkatan tenaga kerja baik dari sektor swasta maupun industri rumah tangga.

3. Potensi investasi Industri Kelapa di Kabupaten Inhil

Berdasarkan Penelitian 3 dilakukan simulasi perhitungan investasi di industri perkebunan Kabupaten Inhil dengan pembagian simulasi sebagai berikut:

- Simulasi 1 (S1) : Peningkatan investasi di sektor kelapa sebesar 50 milyar
- Simulasi 2 (S2) : Peningkatan investasi di sektor industri kelapa skala besar (swasta) sebesar 50 milyar
- Simulasi 3 (S3) : Peningkatan investasi di sektor industri kelapa skala rumah tangga sebesar 50 milyar

A. Dampak Investasi di Sektor Kelapa terhadap Distribusi Pendapatan dan Kemiskinan di Kabupaten Indragiri Hilir

Simulasi Peningkatan investasi di sektor kelapa sebesar 50 milyar mendorong pertumbuhan pendapatan yang paling tinggi kepada masing-masing rumah tangga yang ada di Kabupaten Indragiri Hilir. Hal ini karena Peningkatan investasi di sektor kelapa sebesar 50 milyar yang merupakan investasi di sektor perkebunan kelapa

langsung menyentuh sebagian besar masyarakat Kabupaten Indragiri Hilir yang berprofesi sebagai petani kelapa.

Tabel 1. Persentase Pertumbuhan Pendapatan Masing-masing Simulasi Kebijakan

Rumah Tangga	S1 (%)	S2 (%)	S3 (%)
Buruh tani	2,03	1,87	1,97
Petani lahan 0-1 ha	2,04	1,88	1,98
Petani lahan > 1 ha	2,06	1,93	2,00
Desa golongan bawah	2,07	1,86	1,99
Desa golongan atas	2,12	1,90	2,04
Kota golongan bawah	2,10	1,86	2,01
Kota golongan atas	2,12	1,90	2,04

Sumber: Analisis Penelitian 3

Apabila investasi dilakukan pada sektor industri kelapa skala besar maka pertumbuhan peningkatan pendapatan rumah tangga di Kabupaten Indragiri Hilir diindikasikan rendah, karena hanya sedikit rumah tangga yang ada di Kabupaten Indragiri Hilir yang bekerja di sektor industri kelapa skala besar tersebut.

Tabel 2. Persentase Penurunan Tingkat Kemiskinan Masing-masing Kebijakan

Penurunan Kemiskinan	S1 (%)	S2 (%)	S3 (%)
Buruh tani	0,00	0,00	0,00
Petani lahan 0-1 ha	2,78	2,78	2,78
Petani lahan > 1 ha	5,66	5,66	5,66
Desa golongan bawah	0,00	0,00	0,00
Desa golongan atas	0,00	0,00	0,00
Kota golongan bawah	0,00	0,00	0,00
Kota golongan atas	0,00	0,00	0,00

Sumber: Analisis Penelitian 3

Simulasi S1, S2, dan S3 memberikan

pengaruh kepada penurunan persentase kemiskinan di setiap kelompok rumah tangga. Rumah tangga yang mengalami penurunan kemiskinan adalah rumah tangga petani yang memiliki lahan 0,00 – 1,00 hektar sebesar 2,78% dan rumah tangga petani yang memiliki lahan > 1,00 hektar yaitu 5.66%.

Tabel 3. Persentase Penurunan *Poverty Severity* Masing-masing Kebijakan

Penurunan Poverty Severity	S1 (%)	S2 (%)	S3 (%)
Buruh tani	2,34	2,16	2,30
Petani lahan 0-1 ha	2,57	2,37	2,49
Petani lahan > 1 ha	4,18	3,92	4,06
Desa golongan bawah	2,89	2,61	2,78
Desa golongan atas	6,69	5,67	6,47
Kota golongan bawah	3,30	2,96	3,17
Kota golongan atas	4,65	4,17	4,48

Sumber: Analisis Penelitian 3

Tabel 4. Persentase Penurunan *Poverty Gap* Masing-masing Kebijakan

Penurunan Poverty Gap	S1 (%)	S2 (%)	S3 (%)
Buruh tani	2,00	1,88	1,97
Petani lahan 0-1 ha	1,58	1,46	1,53
Petani lahan > 1 ha	3,61	3,43	3,53
Desa golongan bawah	2,50	2,29	2,42
Desa golongan atas	7,24	4,00	7,11
Kota golongan bawah	2,57	2,38	2,50
Kota golongan atas	2,39	2,14	2,30

Sumber: Analisis Penelitian 3

Ditinjau pada penurunan poverty gap dan poverty severity diindikasikan bahwa setiap

simulasi kebijakan dapat menurunkan kedua indikator kemiskinan tersebut. Penurunan poverty gap dan poverty severity yang paling besar terjadi pada simulasi 1 yaitu 7,24% dan 6,69% pada kelompok rumah tangga desa golongan atas.

B. Dampak Investasi di Sektor Kelapa dan Industri Pengolahan Kelapa terhadap Perekonomian Kabupaten Indragiri Hilir

Penelitian 3 juga memberikan analisis dampak investasi di Sektor Kelapa dan Industri Pengolahan Kelapa terhadap Perekonomian Kabupaten Indragiri Hilir. Analisis ini memberikan hasil informasi yang sangat signifikan untuk mengungkap potensi industri kelapa di Indonesia.

Tabel 5. Rataan Pertumbuhan Neraca Regional (%)

Rataan Pertumbuhan Neraca Regional (%)	Faktor Produksi (%)	Rumah Tangga (%)	Sektor Produksi (%)
S1	2,07	2,08	2,46
S2	1,92	1,90	2,70
S3	2,01	2,01	2,79

Sumber: Analisis Penelitian 3

Simulasi memberikan dampak yang lebih tinggi terhadap pendapatan faktor produksi dan pendapatan sektor produksi dibandingkan dengan simulasi Simulasi 2 dan Simulasi 3. Akan tetapi bila ditinjau dari pertumbuhan sektor produksi simulasi 3 mengindikasikan pertumbuhan yang paling tinggi yaitu 2,79%

Kesimpulan dari identifikasi potensi industri kelapa di Kabupaten Inhil adalah:

- Ditinjau dari sisi luas perkebunan kelapa diindikasikan bahwa Kabupaten Inhil memiliki potensi yang besar dari segi luas yaitu 86,39% dari luas perkebunan Provinsi Riau
- Ditinjau dari efek multiplier diindikasikan bahwa industri kelapa berpotensi memberikan dampak positif yang cukup besar pada perekonomian Kabupaten Inhil serta peningkatan pada sektor tenaga kerja.
- Ditinjau dari sisi potensi investasi diindikasikan bahwa simulasi peningkatan investasi di sektor kelapa sebesar 50 milyar, Peningkatan investasi di sektor industri kelapa skala besar (swasta) sebesar 50 milyar, dan Peningkatan investasi di sektor industri kelapa skala rumah tangga sebesar 50 milyar memberikan dampak yang besar terhadap Distribusi Pendapatan dan

Kemiskinan di Kabupaten Indragiri Hilir serta Perekonomian Kabupaten Indragiri Hilir.

4.2 TANTANGAN INDUSTRI KELAPA DI KABUPATEN INHIL

A. Tantangan Secara Umum

Secara Umum berdasarkan hasil Penelitian 2 diindikasikan bahwa terdapat beberapa tantangan atau kendala yang dihadapi industri kelapa di Kabupaten Indragiri Hilir yaitu sebagai berikut:

- (1) Rendahnya Harga Kelapa Petani dan cenderung tidak stabil dan Lemahnya Bargaining Position Petani
- (2) Usahatani kelapa tidak melakukan teknik budidaya sesuai dengan cara yang benar
- (3) Hilangnya Semangat Petani dalam mengusahakan kebunnya
- (4) Kurangnya akses petani dalam pemasaran hasil karena keterkaitan antar stakeholder yang terlibat masih kurang
- (5) Banyaknya tanaman yang sudah tua dan rusak yang seharusnya di rehabilitasi
- (6) Terjadi alih fungsi lahan

B. Tantangan Pada Luas dan Produksi

Berdasarkan Penelitian 2 juga diindikasikan 2 tantangan besar untuk industri kelapa di Kabupaten Inhil yaitu:

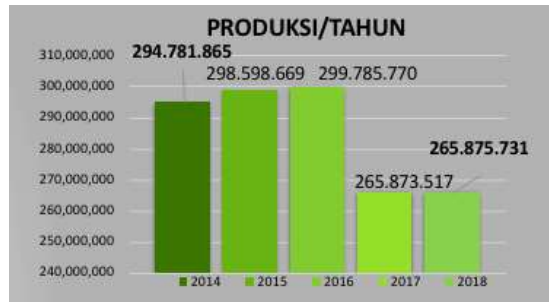
- [1] Penurunan luas Perkebunan Kelapa di Kabupaten Inhil
- [2] Penurunan besaran produksi industri kelapa di Kabupaten Kelapa



Gambar 1. Penurunan luas lahan perkebunan kelapa di Kabupaten Indragiri Hilir

Sumber: Analisis Penelitian 2

Penurunan luas lahan perkebunan kelapa di Kabupaten Inhill menjadi salah satu tantangan yang apabila tidak diperhatikan maka akan berdampak negatif kepada industri kelapa itu sendiri karena akan mempengaruhi besaran hasil produksi.



Gambar 2. Penurunan jumlah produksi perkebunan kelapa di Kabupaten Indragiri Hilir

Sumber: Analisis Penelitian 2

Penurunan jumlah industri terlihat sangat signifikan terjadi. Penurunan ini pertamakali terjadi di tahun 2017. Selaras dengan penurunan luas lahan perkebunan yang signifikan terjadi di tahun 2017.

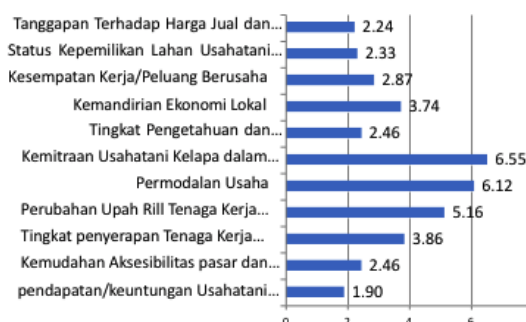
Penurunan jumlah produksi ini signifikan terjadi sehingga harus menjadi perhatian pemerintah Kabupaten Inhil.

C. Tantangan Pada Keberlanjutan

Berdasarkan Penelitian 2 terdapat hasil analisa terkait keberlanjutan di bidang ekonomi, ekologi dan sosial pada sektor industri kelapa di Kabupaten Inhil. Berikut hasil analisa keberlanjutan bidang ekonomi, ekologi, dan sosial.

a) Keberlanjutan Ekonomi

Keberlanjutan ekonomi pada umumnya selalu menjadi fokus utama pembangunan di Indonesia. Indikator ekonomi secara rutin dijadikan indikator utama untuk mengukur berhasil atau gagal sebuah pembangunan atau kebijakan pemerintah daerah. Berikut hasil penelitian terkait keberlanjutan ekonomi industri kelapa di Kabupaten Inhil.



Gambar 3. Indikator Keberlanjutan Ekonomi

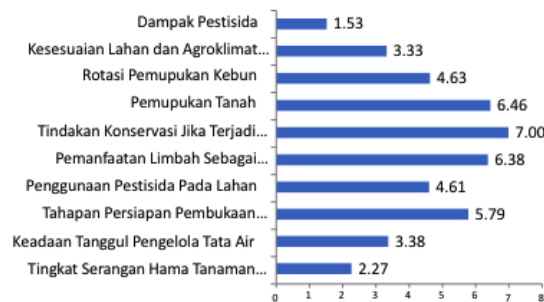
Sumber: Analisis Penelitian 2

Dari indikator penilaian yang berpengaruh besar pada keberlanjutan terdapat 3 faktor terbesar yaitu kemitraan Usaha tani Kelapa dalam usaha, permodalan usaha,

perubahan upah rill tenaga kerja usahatani kelapa. Tiga hal ini harus menjadi perhatian Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir untuk meningkatkan keberlanjutan industri kelapa di bidang ekonomi. Meningkatkan 3 hal ini dapat memicu peningkatan keberlanjutan industri kelapa dari sisi ekonomi.

b) Keberlanjutan Ekologi

Keberlanjutan ekologi pada umumnya jarang menjadi fokus utama pembangunan di Indonesia. Indikator ekologi jarang dijadikan indikator utama untuk mengukur berhasil atau gagal sebuah pembangunan atau kebijakan pemerintah daerah. Akan tetapi secara ilmiah indikator ekologi sangat berperan penting untuk keberlanjutan kehidupan masyarakat. Berikut hasil penelitian terkait keberlanjutan ekologi industri kelapa di Kabupaten Inhil.



Gambar 4. Indikator Keberlanjutan Ekologi
Sumber: Analisis Penelitian 2

Dari indikator penilaian yang berpengaruh besar pada keberlanjutan ekologi terdapat 3 faktor terbesar yaitu Tindakan konversi jika terjadi kerusakan pada lahan karena hama dan penyakit, pemupukan tanah, dan pemanfaatan limbah sebagai penunjang usaha tani. Tiga hal ini harus menjadi perhatian Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir untuk meningkatkan keberlanjutan industri kelapa di bidang ekologi. Meningkatkan 3 hal ini dapat memicu peningkatan keberlanjutan industri kelapa dari sisi ekologi.

c) Keberlanjutan Sosial

Seperti halnya indikator ekologi, Keberlanjutan sosial pada umumnya jarang menjadi fokus utama pembangunan di Indonesia. Indikator sosial jarang dijadikan indikator utama untuk mengukur berhasil atau gagal sebuah pembangunan atau kebijakan pemerintah daerah. Namun pada kenyataannya indikator sosial sangat berperan penting untuk keberlanjutan kehidupan masyarakat. Berikut hasil

penelitian terkait keberlanjutan sosial industri kelapa di Kabupaten Inhil.

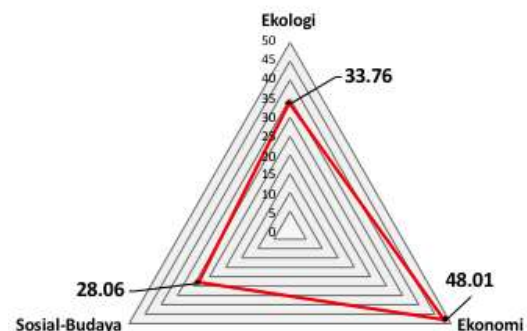


Gambar 5. Indikator Keberlanjutan Sosial
Sumber: Analisis Penelitian 2

Dari indikator penilaian yang berpengaruh besar pada keberlanjutan sosial terdapat 3 faktor terbesar yaitu tingkat relasi petani dan dan pelaku pemasaran, pandangan masyarakat terhadap usahatani kelapa, tingkat pendidikan, dan ketersediaan penyuluhan. Empat hal ini harus menjadi perhatian Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir untuk meningkatkan keberlanjutan industri kelapa di bidang ekologi. Meningkatkan empat hal ini dapat memicu peningkatan keberlanjutan industri kelapa dari sisi ekologi.

d) Keberlanjutan Secara Keseluruhan

Dengan menggunakan Metode Multi Dimensional Scalling Analysis (MDS) Nilai Indeks keberlanjutan. Penelitian 2 menyatakan tiga bidang yaitu ekonomi, ekologi, dan sosial terkait usahatani atau industri kelapa di Kabupaten Indragiri Hilir belum berkelanjutan. Dengan nilai sebagai berikut:



Gambar 6. Diagram Layang

Secara keseluruhan nilai yang di dapat adalah 36.61. berdasarkan Metode Multi Dimensional Scalling Analysis (MDS) Nilai Indeks keberlanjutan nilai minimal untuk menyatakan sebuah sektor berkelanjutan adalah 50. Maka dari ini baik nilai

keseluruhan maupun nilai per sektor ekonomi, ekologi, dan sosial belum mencapai 50 atau dinyatakan belum berkelanjutan.

4.3 REKOMENDASI STRATEGI INDUSTRI KELAPA DI KABUPATEN INHIL

Bagian ini akan menjelaskan terkait rekomendasi strategi. Adapun rekomendasi strategi akan dibagi menjadi tiga bagian yaitu rekomendasi strategi prioritas kebijakan, tahapan tata kelola, prioritas kecamatan.

A. Rekomendasi Strategi Prioritas Kebijakan

Berdasarkan penelitian 1, terdapat tiga prioritas yang dapat difokuskan dalam pengambilan kebijakan. Tiga prioritas ini diindikasikan memberikan dampak positif yang besar apabila diakomodir dengan kebijakan yang tepat dan tendensi yang tinggi serta kontinuitas jangka Panjang.

a. Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia pada industri kelapa di Kabupaten Inhil diindikasikan masih jauh dari cukup. Kreatifitas dari sumber daya manusia yang rendah ini disebabkan kurangnya pengetahuan petani yang dibuktikan bahwa petani rata-rata hanya tamatan SMP dan SMA. Kondisi ini diperburuk dengan rendahnya intensitas penyuluhan atau bimbingan kepada para petani, sehingga menyebabkan tidak maksimalnya pemanfaatan buah kelapa menjadi hasil dari turunan yang memiliki nilai ekonomi.

Kualitas sumber daya manusia memang sangat penting, karena sumber daya manusia merupakan penggerak utama dalam berjalannya suatu kegiatan. Oleh karena ini prioritas kebijakan pada sumber daya manusia harus menjadi fokus atau perhatian Pemerintah Kabupaten Inhil. Program yang dapat dilakukan adalah penyuluhan atau pelatihan rutin dan intensif serta kontiniu harus dilakukan untuk meningkatkan kualitas para petani, sehingga dengan adanya penyuluhan atau pelatihan ini kondisi pendidikan para petani hanya smp atau sma dapat diperbaiki dan meningkat kualitasnya.

b. Kelembagaan

Kelembagaan adalah wadah bagi para stakeholder. Terutama pemerintah yang menjalankan tata kelola secara resmi dan memiliki wewenang dan kekuasaan.

Kelembagaan Pengelolaan kelapa pada setiap kecamatan selama ini masih dilakukan oleh Dinas Perkebunan melalui para penyuluh pertanian. Tidak adanya lembaga khusus yang menangani industri kelapa sehingga komoditi ini tidak terkelola dengan tepat. Berdasarkan potensi yang telah diidentifikasi sebelumnya, komoditi kelapa memiliki potensi yang besar dalam meningkatkan pembangunan Kabupaten Indragiri Hilir terutama dalam pembangunan ekonomi. Kelembagaan harus menyentuh tingkat desa dan berkelanjutan. Kelembagaan ini dapat mengakomodir penyuluhan atau pelatihan rutin.

c. Anggaran

Anggaran berpengaruh kepada keberhasilan dari kegiatan tatakelola yang dilakukan. Dalam pengelolaan kelapa Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir harus merencanakan pengadaan seperti salah satunya teknologi tepat guna yang dapat membantu para petani untuk memproduksi kelapa secara mandiri, semua itu membutuhkan anggaran. Minimnya anggaran inilah yang membuat permasalahan pengelolaan potensi kelapa di Kabupaten Indragiri Hilir terus terjadi.

Kebijakan Selain faktor-faktor di atas, kebijakan atau regulasi yang tegas sangat berpengaruh terhadap kesuksesan dalam pelaksanaan pengelolaan potensi kelapa di Kabupaten Indragiri Hilir. Sampai saat ini Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir belum merumuskan kebijakan yang fokus dan tegas untuk mengurus pengelolaan potensi kelapa sebagai komoditi unggulan

B. Rekomendasi Strategi Tahapan Tata Kelola

Tata Kelola atau pengelolaan dalam bahasa inggris adalah management. Selain berarti pengelolaan, management juga dapat berarti kepemimpinan, ketatalaksanaan, kepengurusan, pembinaan, penguasaan. Follet dalam (Suhardi, 2018) menyatakan bahwa tata kelola sebagai the art of getting things done through people (seni dalam menyelesaikan pekerjaan melalui orang lain). Menurut Atmosudirjo dalam (2005) dinyatakan bahwa tata kelola adalah pengendalian dan pemanfaatan dari semua elemen serta sumber daya yang diperlukan untuk mencapai atau menyelesaikan suatu perencanaan atau suatu tujuan kerja tertentu.

Berdasarkan Penelitian 1 dikemukakan hasil rekomendasi strategi tahapan dalam tata kelola industri kelapa di Kabupaten Indragiri Hilir.

a. Perencanaan

Perencanaan sangat diperlukan untuk menentukan tujuan secara keseluruhan. Penentuan tujuan adalah suatu kegiatan untuk menetapkan tujuan yang ingin dicapai. Dalam ranah pemerintahan, terdapat aturan khusus terkait perencanaan di daerah. Rencana daerah untuk seluruh sektor termasuk perkebunan tertuang di Rencana Pembangunan Jangka Panjang dan Menengah Daerah.

Pemerintah Kabupaten Inhil dengan pelaksana Dinas Perkebunan telah menyusun tujuan dari pengelolaan kelapa dengan memasukkan pengelolaan kelapa ke dalam RPJMD Kabupaten Indragiri Hilir tahun 2018-2023. Kebijakan ini diharapkan dapat memaksimalkan potensi komoditi kelapa di Kabupaten Indragiri Hilir. Perencanaan ini harus diimplementasikan dengan konsisten dan tepat.

b. Organizing (Pengorganisasian)

Perencanaan memerlukan pengorganisasian yang baik agar perencanaan bisa terlaksana dengan tepat. Dengan adanya pembagian kerja yang tepat maka pekerjaan dapat dilaksanakan secara efektif dan tidak adanya tumpang tindih wewenang. Hal ini diraih karena pekerjaan dibagi sesuai dengan tugas dan fungsinya serta penentuan waktu yang tepat.

Dinas Perkebunan Kabupaten Indragiri Hilir mempunyai tugas dan fungsi sebagai instansi pemerintah yang bertanggung jawab mengenai permasalahan perkebunan salah satunya komoditi kelapa. Perencanaan akan tercapai apabila SDM dalam sebuah organisasi tersebut memiliki kemampuan yang sesuai dengan posisi jabatannya.

Pada Dinas Perkebunan Kabupaten Indragiri Hilir masih terdapat beberapa pegawai menduduki jabatan yang tidak sesuai dengan kemampuan. Hal ini dibuktikan dengan adanya jabatan penyuluh yang tugasnya sebagai pembimbing para petani dipegang oleh SDM dengan tamatan SMA. Kondisi seperti ini apabila terjadi di berbagai tingkatan Dinas Perkebunan dapat mengancam keberhasilan kebijakan dan rencana yang telah disusun.

Tim penyuluh ditugaskan ke setiap kecamatan yang ada di Kabupaten Indragiri Hilir. Namun berdasarkan survey di Kecamatan Enok, petani kelapa mengatakan bahwa penyuluh tidak memberikan sosialisasi atau arahan tentang tata cara pengelolaan kelapa yang baik. Evaluasi harus terus dilakukan secara rutin untuk

menjaga kualitas penyuluhan di setiap daerah.

c. Commanding (pengarahan)

Tahapan pengarahan sudah pada tingkat pelaksanaan di lapangan. Tujuan pengarahan ini adalah untuk memotivasi, membimbing, mengarahkan dan memberikan perintah kepada pelaksana pada tingkat bawah. Pengarahan dalam Pengelolaan Potensi Kelapa di Kabupaten Indragiri Hilir meliputi pemberian bimbingan, saran ataupun perintah dan juga sosialisasi dari pimpinan kepada segala perangkat atau dari pemerintah yang dalam hal ini adalah Dinas Perkebunan Kabupaten Indragiri Hilir kepada petani kelapa untuk mengatur dan menjalankan segala kegiatan dan tugas yang berkaitan dengan Pengelolaan Potensi Kelapa Di Kabupaten Indragiri Hilir.

Bimbingan dalam Pengelolaan Potensi Kelapa di Kabupaten Indragiri Hilir dimaksudkan agar pegawai Dinas Perkebunan Kabupaten Indragiri Hilir lebih terarah dalam bekerja sehingga dibutuhkan bimbingan yang membangun kinerja.

Pengarahan dapat pula berupa saran. Saran yang dimaksud bertujuan demi meningkatkan Pengelolaan Potensi Kelapa di Kabupaten Indragiri Hilir yang lebih baik. Internal Dinas Perkebunan Kabupaten Indragiri Hilir terbuka satu sama lain dan juga Dinas Perkebunan Kabupaten Indragiri Hilir terbuka dengan pihak luar dalam menerima saran yang membangun dalam pengelolaan kelapa. Ada keterbukaan antara atasan dan bawahan untuk memberikan ataupun menerima saran yang diberikan untuk senantiasa memajukan pengelolaan kelapa di Indragiri Hilir.

Pengarahan dapat dilakukan melalui lisan dari pimpinan kepada pelaksana di bawahnya. Comanding atau pengarahan ini dapat dilakukan melalui perintah resmi seperti SK, peraturan resmi kepala dinas, hingga peraturan resmi kepala bidang untuk pelaksanaan di lapangan. Hal ini dapat memberikan penguatan pada pengarahan agar bisa terlaksana sesuai target dan tepat sasaran.

d. Pengkoordinasian

Pengkoordinasian merupakan berbagai upaya atau tindakan yang dilakukan seorang pemimpin untuk menghindari terjadinya permasalahan di lapangan, pekerjaan yang tidak tertata, seras kekosongan kegiatan dengan cara menghubungkan, menyatukan dan menyelaraskan tugas-tugas dan pekerjaan bawahan dalam mencapai suatu tujuan bersama yang telah ditentukan.

Indikator koordinasi antara lain pembagian kerja, disiplin, komunikasi, kesatuan tindakan. Maka Dinas Perkebunan Kabupaten Indragiri Hilir, serta instansi lainnya dan juga petani kelapa di Kecamatan Enok dilakukanlah pembagian kerja yang sesuai keahlian, tupoksi, serta waktu atau durasi yang tepat. Pembagian kerja diatur dalam tupoksinya berdasarkan arahan dan Peraturan Perundangundangan yang berlaku.

Perbedaan Pengkoordinasian dengan Pengorganisasian ada pada tingkat pengerjaannya. Pengkoordinasian dilakukan di lapangan atau tingkat pelaksanaan langsung. Dilakukan sebagai mentuk implementasi langsung di ranah pelaksana detail di lapangan. Pengkoordinasian membutuhkan kemampuan komunikasi, negosiasi, dan diskusi yang baik.

Komunikasi bertujuan untuk mendapatkan informasi-informasi penting dari instansi-instansi yang bekerjasama agar terjadinya koordinasi yang baik demi tercapainya tujuan bersama. Berdasarkan survey yang telah dilakukan, komunikasi antara Dinas Perkebunan dengan masyarakat melalui penyuluh masih kurang efektif dan efisien. Penyuluh yang bertugas untuk membina tidak menjalankan dengan sepenuhnya sehingga informasi atau arahan dari Dinas Perkebunan kepada masyarakat tidak tersampaikan dengan baik, begitu juga sebaliknya.

e. Pengawasan

Pengawasan merupakan salah satu fungsi manajemen yang sangat penting, sehingga berbagai ahli manajemen dalam memberikan pendapatnya tentang apa saja fungsi-fungsi manajemen selalu menempatkan kegiatan pengawasan sebagai salah satu kegiatan yang sangat penting dalam manajemen. Begitu pentingnya pengawasan dalam suatu organisasi, sehingga keberhasilan atau kinerja organisasi menjadi tolak ukur sampai dimana kegiatan pengawasan terhadap organisasi tersebut.

Pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Perkebunan Kabupaten Indragiri Hilir dalam pengelolaan kelapa di setiap kecamatan mengalami keterbatasan karena tidak ada badan khusus yang dibentuk oleh Dinas Perkebunan untuk melaksanakan fungsi pengawasan. Dalam melaksanakan pengawasan maka harus ada standar yang harus ditetapkan sehingga dapat menilai pengelolaan yang menyimpang yang terjadi di lapangan. Secara umum pemerintah masih mengacu pada Undang-Undang No 39

Tahun 2014 Tentang Perkebunan dan Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Perkebunan.

Pengawasan dilakukan untuk mengidentifikasi deviasi atau penyimpangan yang terjadi pada implementasi kegiatan. Dalam melakukan Pengelolaan Potensi Kelapa di Kabupaten Indragiri Hilir, Dinas Perkebunan juga melakukan perbandingan kegiatan dengan standar yang telah ditetapkan untuk melihat apakah kegiatan yang dilakukan berhasil atau terjadi penyimpangan dengan melakukan evaluasi pada internal Dinas Perkebunan juga dengan pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir beserta instansi lain yang terkait dalam pengelolaan potensi kelapa. Proses akhir dalam fungsi manajemen pengawasan yaitu melakukan perbaikan. Kegiatan ini dilakukan apabila terjadi penyimpangan atau ketidaksesuaian yang terjadi dengan standar yang telah ditetapkan sebelumnya.

Dinas Perkebunan Kabupaten Indragiri Hilir melakukan perbaikan pada setiap kegagalan atau kekurangan-kekurangan yang terjadi ketika melaksanakan pengelolaan komoditi kelapa. Terjadinya kegagalan dan kekurangan dalam melaksanakan pengelolaan komoditi kelapa pada rencana sebelumnya, Dinas Perkebunan Kabupaten Indragiri Hilir menjadikannya acuan untuk perbaikan pada masa mendatang.

C. Rekomendasi Prioritas Kecamatan

Berdasarkan Penelitian 4 yang mengidentifikasi tiga besar kecamatan yang paling besar potensi industri kelapa. Ditinjau dari potensi perkebunan kelapa, berikut alternatif kecamatan-kecamatan yang memiliki potensi perkebunan kelapa terbaik dibandingkan kecamatan-kecamatan lainnya. Kecamatan-kecamatan yang dimaksud diantaranya :

1) Kecamatan Mandah

Kecamatan Mandah adalah kecamatan dengan luasan lahan perkebunan kelapa terbesar di Kabupaten Indragiri Hilir yaitu 55.216 hektar. Selain itu, Kecamatan Mandah juga telah direncanakan sebagai sentra perkebunan kelapa rakyat dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 2014-2018 Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir. Dilihat dari segi kualitas tanaman kelapa yang dihasilkan pun, Kecamatan Mandah merupakan kecamatan yang jumlah tanaman menghasilkannya memiliki luasan terbesar pula di Kabupaten Indragiri Hilir. Meski demikian, potensi

perkebunan kelapa belum dimanfaatkan secara maksimal. Hal tersebut dapat dilihat dari angka produktivitas yang masih dibawah standar, yaitu hanya 1,2 ton/ha.

2) Kecamatan Enok

Kecamatan Enok merupakan kecamatan dengan luasan lahan perkebunan kelapa terbesar kedua di Kabupaten Indragiri Hilir yaitu seluas 44.203 hektar. Selain itu, Kecamatan Enok juga telah direncanakan sebagai sentra perkebunan kelapa rakyat dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 2014-2018 Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir. Dilihat dari segi kualitas tanaman kelapa yang dihasilkan pun, Kecamatan Enok merupakan kecamatan yang jumlah tanaman menghasilkannya terluas kedua di Kabupaten Indragiri Hilir. Meski demikian, potensi perkebunan kelapa belum dimanfaatkan secara maksimal. Hal tersebut dapat dilihat dari angka produktivitas yang masih dibawah standar, yaitu hanya 0,95 ton/ha bahkan berada dibawah angka 1.

3) Kecamatan Kateman

Kecamatan Kateman merupakan kecamatan dengan luasan lahan perkebunan kelapa terbesar ketiga di Kabupaten Indragiri Hilir yaitu seluas 37.739 hektar. Selain itu, Kecamatan Kateman juga telah direncanakan sebagai sentra perkebunan kelapa rakyat dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 2014-2018 Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir. Dilihat dari segi kualitas tanaman kelapa yang dihasilkan pun, Kecamatan Kateman merupakan kecamatan yang jumlah tanaman menghasilkannya terluas ketiga di Kabupaten Indragiri Hilir. Meski demikian, potensi perkebunan kelapa belum dimanfaatkan secara maksimal. Hal tersebut dapat dilihat dari angka produktivitas yang masih dibawah standar, yaitu hanya 1,2 ton/ha.

4.4 Kesimpulan dan Saran

A. Kesimpulan

Kabupaten Inhil memiliki potensi besar pada industri kelapa. Potensi dasar yang dimiliki adalah luas lahan perkebunan kelapa. Luas perkebunan di Kabupaten Inhil adalah yang terbesar di Provinsi Riau. Potensi juga terdapat pada dampak positif yang bisa dihasilkan industri kelapa. Industri kelapa berpotensi meningkatkan perekonomian Kabupaten Inhil serta peningkatan tenaga kerja baik dari sektor swasta maupun industri rumah tangga.

Potensi lain yang dimiliki dan

dipertimbangkan oleh Pemerintah Kabupaten Inhil potensi investasi kepada industri kelapa yang dapat meningkatkan perekonomian daerah. itinjau dari sisi potensi investasi diindikasikan bahwa simulasi peningkatan investasi di sektor kelapa sebesar 50 milyar, Peningkatan investasi di sektor industri kelapa skala besar (swasta) sebesar 50 milyar, dan Peningkatan investasi di sektor industri kelapa skala rumah tangga sebesar 50 milyar memberikan dampak yang besar terhadap Distribusi Pendapatan dan Kemiskinan serta Perekonomian Kabupaten Indragiri Hilir.

Terdapat pula tantangan dalam pelaksanaan industri kelapa di Kabupaten Inhil. Secara umum tantangan yang dihadapi adalah Rendahnya Harga Kelapa Petani dan cenderung tidak stabil dan Lemahnya Bargining Position Petani, Usahatani kelapa tidak melakukan teknik budidaya sesuai dengan cara yang benar, Hilangnya Semangat Petani dalam mengusahakan kebunnya, Kurangnya akses petani dalam pemasaran hasil karena keterkaitan antar stakeholder yang terlibat masih kurang, Banyaknya tanaman yang sudah tua dan rusak yang seharusnya di rehabilitasi, dan Terjadi alih fungsi lahan. Ditambah lagi secara detail terdapat tantangan dari penurunan luas lahan dan jumlah produksi pertahunnya, serta masih belum berkelanjutannya industri kelapa Kabupaten Inhil dari sektor ekonomi, ekologi, dan sosial.

Rekomendasi yang diberikan melalui jurnal ini adalah mengutip beberapa penelitian ilmiah sebelumnya. Rekomendasi strategi yang diberikan meliputi rekomendasi prioritas kebijakan, tahapan tata kelola, serta kecamatan dengan potensi terbesar untuk menjadi prioritas. Rangkuman rekomendasi strategi akan lebih detail dijelaskan di bagian saran.

B. Saran

Rekomendasi yang diberikan melalui jurnal ini adalah mengutip beberapa penelitian ilmiah sebelumnya

- Dengan waktu dan sumber daya yang terbatas dan agar penyelesaian permasalahan terkini dapat segera teratasi, Pemerintah direkomendasikan memprioritaskan kebijakan kepada sektor yang paling penting. Berdasarkan penelitian yang dilakukan terdapat tiga sektor paling penting untuk menjadi prioritas yaitu peningkatan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia industri kelapa baik dari pemerintahan maupun

petani, penambahan anggaran industri kelapa, dan pembentukan dan penguatan kelembagaan industri kelapa.

- Melaksanakan tata kelola yang terstruktur, konsisten, dan terintegrasi. Tata kelola meliputi Perencanaan, Pengorganisasian, Pengarahan, Pengkoordinasian, dan Pengawasan. Rekomendasi detail sudah dijelaskan pada bagian rekomendasi strategi
- Memilih prioritas kecamatan-kecamatan prioritas untuk dijadikan prioritas utama terlebih dahulu. Hal ini untuk memaksimalkan kecamatan yang paling besar potensinya. Tidak berarti meninggalkan kecamatan lain, akan tetapi untuk memaksimalkan hasil makan tiga kecamatan paling besar potensinya harus menjadi fokus utama untuk durasi waktu tertentu.

Daftar Pustaka

- [1] Alfa, A., 2018, Pemetaan Tridarma Program Studi Teknik Sipil Universitas Islam Indragiri Dalam Pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs). Selodang Mayang: Jurnal Ilmiah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir, 4(2). <https://doi.org/https://doi.org/10.47521/selodangmayang.v4i2.94>
- [2] Atmosudirdjo, (2005). Manajemen Dasar Pengertian dan Masalah. Malayu: Rineka Cipta
- [3] Ahmad Aris, Bambang Juanda, Akhmad Fauzi, Dan Dedi Budiman Hakim, (2010). Dampak Pengembangan Perkebunan Kelapa Rakyat Terhadap Kemiskinan Dan Perekonomian Kabupaten Indragiri Hilir. Bogor: Institut Pertanian Bogor
- [4] Setiawan, Hendri, (2019). Pengelolaan Potensi Kelapa Di Kabupaten Indragiri Hilir. Pekanbaru: Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Riau
- [5] Suhardi, (2018). Pengantar Manajemen Dan Aplikasinya. Yogyakarta: Gava Media.
- [6] Rasihen, Yogi, (2021). Analisis Keberlanjutan Usahatani Perkebunan Kelapa Rakyat Di Kabupaten Indragiri Hilir. Bogor: Institut Pertanian Bogor
- [7] Suwirni, Dita, (2016). Penentuan Lokasi Cluster Industri Kelapa Di Kabupaten Indragiri Hilir. Surabaya: Institut Teknologi Sepuluh Nopember Surabaya